

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Bangsa yang terdidik dan sehat akan menjadi pekerja yang lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak . Tanpa didukung oleh keahlian dan pengetahuan yang cukup, maka suatu negara tidak bisa berkembang dan bersaing dengan perkembangan zaman meskipun negara tersebut adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kemudian Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas (angka kelahiran) masyarakat.

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan berlangsung dalam suatu lingkungan yang terdiri dari lingkungan pendidikan, lingkungan ini mencakup lingkungan fisik sosial budaya dan adanya intelektual keagamaan. Pengertian lingkungan fisik merupakan tempat dan memberikan dukungan atau juga bisa menjadi hambatan bagi proses berlangsungnya pendidikan, proses pendidikan akan mencapai maksimal apabila sarana dan prasana yang memadai. Pengertian lingkungan sosial dan budaya merupakan lingkungan adanya pergaulan antara pendidik dan peserta didik dan

setiap orang mempunyai karakteristik pribadi masing masing. Kemudian lingkungan intelektual merupakan kondisi iklim yang mendorong agar menunjang pengembangan kemampuan untuk berfikir. Dan yang terakhir lingkungan keagamaan merupakan kegiatan perilaku manusia dalam melaksanakan kewajiban dan nilai nilai keagamaan.

Jika ruang lingkup sudah berjalan dengan baik, pendidikan sudah sangat profesional dalam memberikan pendidikan kepada objek dan saat ini prasarana sudah memenuhi, dengan adanya metode pembelajaran yang dapat diterima dengan baik pendidikan akan berjalan dengan baik. Tetapi masih banyaknya di daerah terpecil yang masih membutuhkan ruang lingkup yang lebih baik. Yang membedakan masyarakat miskin dan non miskin adalah jika masyarakat miskin berada di suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi pendidikan di indonesia saat ini belum optimum. Tingkat pendidikan negara yang secara sumberdaya alam sangat kaya raya ini tertinggal jauh di bawah negara tetangga. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia sering terjadi. Terutama di wilayah pedesaan sulit sekali membangun fasilitas pendidikan yang layak, dan banyaknya masyarakat yang kurang

mengetahui artinya pendidikan itu penting. Kondisi ini terbukti dari rendahnya kualitas lulusan, rendahnya pendidikan disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kurikulum, biaya pendidikan, dan fasilitas hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Meskipun Indonesia mempunyai kebijakan pemerintah melalui subsidi pendidikan tetapi masih saja tingkat pendidikan di Indonesia rendah, biaya salah satunya menjadi kendala pendidikan di Indonesia yang paling tinggi, banyak siswa maupun siswi yang memutuskan tidak bersekolah padahal pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu meringankan beban pengeluaran pendidikan bagi masyarakat, apakah dana yang disalurkan tidak merata seharusnya dana-dana pusat (APBN) untuk pengelolaan pendidikan dan pengalokasian seharusnya diberikan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri agar pemanfaatannya akan lebih efisien dan efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif. Kemudian fasilitas tidak memadai salah satu faktor terpenting bagi pendidikan, jika ingin pendidikan di Indonesia optimum tentunya pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas seperti bangunan sekolah akses jalan menuju sekolah banyak sekali di daerah pedesaan yang ingin menuju sekolah harus melewati jembatan yang sudah tidak layak dipakai dan yang lainnya. Pemerintah pun harus merata membagikan atau memperlihatkan kondisi pendidikan di pedalaman desa maupun kota.

Sesuai dengan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah juga mengacu pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang Ayat-ayat tersebut masing masing berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, untuk memenuhi hak warga negara tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu khususnya pendidikan dasar 9 tahun kepada setiap warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam investasi sumber daya manusia. Pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan ketimpangan pendapatan tenagakerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenagakerja di Indonesia. Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia (Suyanto, 2006:11).

Kota Bandung mendapat julukan sebagai kota terpelajar karena banyaknya sekolah dan universitas yang berdiri. Masih banyak tantangan dan masalah uang di

hadapi Kota Bandung mewujudkan pendidikan Bandung juara, berbagai program dan langkah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung khususnya yang dilakukan Wali Kota Bandung membangun strategi agar pendidikan di Kota Bandung menjadi lebih baik diantaranya strategi tersebut pertama memantapkan amanat dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedua membangun kolaborasi dengan menyertakan *stakeholder* pendidikan dan yang terakhir terus berinovasi. Dengan adanya ketiga strategi tersebut membuahkan hasil yang positif bagi pendidikan di Kota Bandung. Kondisi pendidikan di Kota Bandung saat ini masih banyak permasalahan diantaranya fasilitas dan Di Kota Bandung pendidikan sangat diperlukan selain itu masyarakat di Kota Bandung masih ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi yang kurang terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin kini diberikan fasilitas atau bantuan dari pemerintah yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sedangkan masyarakat yang mampu hanya mendapatkan bantuan berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah), biaya, lambat laun permasalahan tersebut dapat terselesaikan secara perlahan. jika bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diberlakukan dari tingkat SD hingga SMP kini bantuan dari pemerintah berupaya mengadakan untuk tingkat SMA terutama di sekolah sekolah negeri, kemudian KIP (Kartu Indonesia Pintar) berlaku untuk semua siswa atau siswi hingga tingkat SMA atau SMK yang kurang mampu. Karena tidak semua masyarakat mampu membiayai hingga melanjutkan pendidikan hingga SMA atau SMK disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak cukup, sedangkan masyarakat dalam segi

ekonominya mencukupi tentu dapat melanjutkan pendidikan hingga SMA atau SMK. Program ini ditunjukkan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa dan siswi untuk bersekolah, sehingga nantinya jika ada masyarakat yang kurang mampu tidak ada lagi terpikir untuk berhenti bersekolah dan kelebihan KIP (Kartu Indonesia Pintar) bisa menarik siswi atau siswa yang telah putus sekolah agar bisa kembali bersekolah. Kemudian jika dibandingkan dengan masyarakat non miskin masyarakat miskin lebih banyak menikmati subsidi pendidikan karena mendapatkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Berikut ini tabel jumlah penduduk usia sekolah pada setiap satuan pendidikan menurut Renstra Dinas Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Pada Setiap Satuan
Pendidikan Menurut Renstra Dinas Pendidikan Di Kota Bandung
Tahun 2013-2018

| Penduduk Usia Sekolah | | Keadaan Siswa | |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------|
| Usia | Jumlah | Satuan Pendidikan | Jumlah (orang) |
| Usia 7-12 Tahun | 264.351 | SD/MI | 256.504 |
| Usia 13-15 Tahun | 139.583 | SMP/MTs | 117.187 |
| Usia 16 - 18 Tahun | 137.417 | SMA/MA/SMK | 127.583 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dilihat dari tabel jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun mencapai jumlah 264.351. Dari jumlah penduduk usia 7-12 jumlah yang sekolah pada tingkatan SD/MI berjumlah 256.504. Sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun mencapai jumlah 139.583. Dari jumlah penduduk usia 13-15 jumlah yang sekolah pada tingkatan SMP/MTS berjumlah 117.187. Sedangkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mencapai jumlah 137.417 . Dari jumlah penduduk usia 16-18 jumlah yang sekolah pada tingkatan SMA/MA/SMK berjumlah 127.583.

**Tabel 1.2 Anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
9Di Kota Bandung Tahun 2014-2016 (Rp)**

| Uraian | Anggaran Dana BOS Pada Tahun 2014 | Anggaran Dana BOS Pada Tahun 2015 | Anggaran Dana BOS Pada Tahun 2016 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dana Bos | 52.267.580.000 | 214.482.000.000 | 204.579.300.000 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dilihat dari tabel 1.2 pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, pada tahun 2014 hingga di tahun 2015 anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) mengalami kenaikan sedangkan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di tahun 2015 hingga di tahun 2016 mengalami penurunan, hal tersebut mengakibatkan berdampak positif bagi masyarakat karena pendapatan masyarakat menaik sehingga bagi pemerintah untuk mengeluarkan dana anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berkurang.

Tabel 1.3 Anggaran PIP (Program Indonesia Pintar)

Di Kota Bandung Tahun 2015-2016 (Rp)

| Uraian | Anggaran Dana PIP Pada Tahun 2015 | Anggaran Dana PIP Pada Tahun 2016 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dana PIP | 54.163.875.000 | 54.163.875.000 |

Sumber: www.sipintar.web.id

Dilihat dari tabel di atas dana KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau PIP (Kartu Indonesia Pintar) yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 dengan jumlah 54.163.875.000, sedangkan pada tahun 2016 dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan jumlah dana yang sama seperti tahun 2015 yaitu dengan jumlah 54.163.875.000. Hal tersebut membuat tidak adanya perubahan di tahun 2015-2016. Maka dari itu dengan adanya anak yang sudah memiliki kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) maka akan mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar).

Tabel 1.4 Angka Putus Sekolah Di Kota Bandung

Tahun 2009-2013

| Satuan Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SD/MI | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SMP/MTs | 0,08% | 0,06% | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
| SMA/MA/SMK | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dilihat dari tabel 1.4 Angka putus sekolah di Kota Bandung Tahun 2009-2013 yaitu mengalami perubahan yang cukup baik pada setiap tahunnya. Dari satuan pendidikan tingkat SD/MI adalah 0,01 % yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang berarti tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk satuan

pendidikan tingkat SMP/MTS sebagian besar berada pada tahun 2009 yaitu sebanyak 0,08 % yang berarti mengalami perubahan, dan untuk satuan pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sebagian besar berada pada tahun 2009 yaitu sebanyak 0,04 % yang berarti mengalami perubahan.

Kota Bandung meliputi 30 Kecamatan yang tersebar di Wilayah Bandung Utara, Selatan, Barat, Timur dan Tengah. Kecamatan yang ada di Wilayah Bandung Timur terdiri dari 12 Kecamatan. Artinya 40% dari total Kecamatan di Kota Bandung ada di Wilayah Bandung Timur. Berikut data banyaknya masyarakat yang menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) di masing-masing Kecamatan Wilayah Bandung Timur

Tabel 1.5 Jumlah Sekolah Yang Menerima BOS Dan Jumlah Siswa Atau Siswi Yang Menerima KIP Di Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

| No | Kecamatan | Jumlah BOS (Unit) | Jumlah KIP (Siswa) |
|-----|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Buah Batu | 34 | 4.526 |
| 2. | Rancasari | 23 | 1.563 |
| 3. | Gede Bage | 9 | 1.494 |
| 4. | Cibiru | 32 | 3.518 |
| 5. | Panyileukan | 13 | 829 |
| 6. | Ujung Berung | 29 | 3.437 |
| 7. | Cinambo | 8 | 435 |
| 8. | Arcamanik | 29 | 2.386 |
| 9. | Antapani | 26 | 1.784 |
| 10. | Mandalajati | 24 | 2.264 |
| 11. | Kiaracondong | 53 | 5.270 |
| 12. | Batununggal | 43 | 5.498 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2016 jumlah yang paling banyak atau paling tinggi menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) berada di Wilayah Bandung Timur yaitu Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Batununggal, dan yang menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) paling tinggi terdapat di Kecamatan Kiaracondong dengan berjumlah 40 sekolah , sedangkan yang menerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) paling tinggi terdapat di Kecamatan Batununggal dengan berjumlah 5.498 siswa atau siswi. Kemudian dilihat dari data Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendapatkan bantuan subsidi pendidikan paling tinggi yaitu Kecamatan Kiaracondong.

Tabel 1.6 Jumlah Siswa Dan Siswi Yang Bersekolah Di Tiap Kelurahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2017

| Kelurahan | Jumlah Siswa dan siswi |
|------------------|------------------------|
| Babakan Sari | 14.487 |
| Babakan Surabaya | 9.021 |
| Sukapura | 12.699 |
| Cicahem | 6.855 |
| Kebon Jayati | 6.780 |
| Kebon Kakung | 7.567 |

Dilihat dari tabel diatas Kelurahan yang paling tinggi yaitu Kelurahan Babakan Sari yang berada di Kecamatan Kiaracondong dengan jumlah anak yang bersekolah adalah 14.487 , bahwa dari keseluruhan Kelurahan di Kecamatan

Kiaracondong Kelurahan Babakan Sari yang paling padat atau yang paling tinggi anak yang bersekolah siswa maupun siswi.

Jika pemerintah melakukan adanya subsidi pendidikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) tentunya pengeluaran rumah tangga non makanan dapat terbantu dan mengurangi beban masyarakat, serta siswa maupun siswi tidak akan lagi beralasan untuk berhenti bersekolah. Oleh karena itu pendidikan sangat diperlukan bagi masyarakat di Kota Bandung karena peraturan pendidikan wajib belajar hingga 12 tahun dimulai juni 2015. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui dampak adanya subsidi pendidikan bagi pengeluaran masyarakat miskin dan non miskin di Wilayah Bandung Timur khususnya di Kecamatan Kiaracondong. Oleh karena itu alasan tersebut maka penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Dampak Subsidi Pendidikan BOS Dan KIP Pada Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dan Rumah Tangga Non Miskin Di Wilayah Bandung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dapat diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Apakah ada perbedaan dari pengeluaran subsidi pendidikan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran makanan dan non makanan, jumlah anak yang bersekolah dan pendapatan masyarakat, terhadap masyarakat miskin dengan masyarakat non miskin di Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari pengeluaran subsidi pendidikan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran makanan dan non makanan, jumlah anak yang bersekolah dan pendapatan masyarakat, untuk masyarakat miskin dengan masyarakat non miskin di Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan. Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

1. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Memberikan informasi mengenai dampak BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) terhadap pengeluaran rumah tangga miskin dan rumah tangga non miskin di Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracandong.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah ditingkat Kelurahan/Kecamatan dalam mengetahui dampak BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) terhadap pengeluaran rumah tangga miskin dan rumah tangga non miskin di Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracandong.